

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembanguna nasional iyalah memajukan kinerja perekonomian supaya mampu menciptakan lapangan kerja serta menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang akan mewujutkan kesejahteraan penduduk Indonesia. salah satu sasaran pembangunan nasional ialah dengan menurunkan taraf kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu penyakit pada ekonomi, sebagai akibatnya wajib disembuhkan atau paling tidak dikurangi. salah satu penghambat pembngunan ekonomi ialah kemiskinan,karena tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung bisa dinikmati segenap masyarakat Negaranya yang tampah memandang hal apapun itu.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan Nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di suatu Negara, syarat pertama pengentasan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan saja tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun hal ini perlu dilakukan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan mempunyai arti penting dalam mengurangi kemiskinan jika tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan. karena bila menggunakan istilah ini, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.(Kuddus, 2019).

banyak Negara syarat primer bagi terciptanya penurunan kemiskinan merupakan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak relatif buat mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yg dibutuhkan. fenomena ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai tak berarti bagi penurunan masyarakat miskin Jika tak diiringi menggunakan pemerataan pendapatan (Romi, 2018)

Kemiskinan yang tinggi akan menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Kemiskinan menjadi suatu hal berfokus yangg wajib ditangani sang pemerintah sebab kemiskinan pada suatu Negara menjadi cerminan asal tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal pada Negara serta wilayah tersebut.

Kemiskinan banyak menyebabkan dampak negatif seperti duduk perkara sosial, kemiskinan pula mempengaruhi pembangunan di suatu Daerah atau Negara (Tiara, 2016).

Kemiskinan ialah perseteruan yang komplek yang bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja tetapi juga sebagian besar terjadi di pedesaan. Berdasarkan Emil Salim, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang pertanda kurangnya pendapatan buat memenuhi kebutuhan utama. Kebutuhan utama bisa diartikan menjadi suatu paket barang atau jasa yang dibutuhkan oleh setiap orang buat bisa permanen hayati secara manusiawi, paket tadi terdiri asal sandang, pangan, papan.

Secara luas, kemiskinan diakibatkan kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola pemikiran asal daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat berasal secara umum dikuasai rakyat miskin hanya memiliki asal daya alam jumlah yang terbatas. Kemiskinan sendiri pula yang menyangkut pada aspek karena berkaitan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah serta ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin dan buruknya lingkungan hidup (Romi, 2018).

Berbicara mengenai kemiskinan tidak mudah dalam mendefinisikannya sebab kemiskinan bersifat relatif sebagai akibatnya sulit untuk menjabarkan kemiskinan itu sendiri. Berangkat asal problem tersebut maka ada lembaga serta banyak ahli yang mencoba buat merumuskan dan menjabarkan definisi kemiskinan. Berasal berbagi teori-teori yang di rumuskan para ahli telah memiliki versi masing-masing yang tidak selaras. Kemiskinan dapat didefinisikan menjadi suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu taraf kekurangan materi atau sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum dan berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 tingkat penduduk miskin menurut Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan naik dan turun dari Tahun ke Tahunnya seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Atau Kota Yang Ada
Di Provinsi Maluku Utara ribu jiwa Tahun 2013-2022 (Persen)

wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Halmahera Barat	10,50	10,44	10,81	9,84	9,90	10,14	10,13	10,56	10,59	10,53
Halmahera Tengah	8,30	8,23	7,52	7,10	4,42	7,51	7,81	7,70	7,65	6,93
Kepulauan Sula	13,00	12,63	9,02	8,79	8,79	9,19	9,29	8,81	8,36	7,84
Halmahera Selatan	12,90	12,72	10,09	9,06	9,25	11,01	11,79	12,41	12,23	11,89
Halmahera Utara	10,30	10,18	8,95	7,59	7,84	8,56	8,79	8,75	10,15	9,01
Halmahera timur	13,30	13,30	13,30	13,48	13,62	13,82	14,53	14,97	14,58	13,00
Pulau Morotai	5,30	5,20	5,09	4,38	4,50	4,67	4,86	4,43	4,45	3,77
Pulau Taliabu	-	-	3,55	3,73	3,71	3,85	3,98	3,89	4,05	3,76
Kota Ternate	6,60	6,61	6,37	5,74	6,04	6,76	7,25	8,18	8,45	7,54
Kota Tidore Kepulauan	5,50	5,49	5,20	4,96	5,39	5,95	6,17	6,66	6,65	6,08

Sumber :Data Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas selama 10 Tahun terakhir, kemiskinan di Provinsi Maluku Utara cenderung meningkat dan menurun dari Tahun ke Tahun Mulai dari tahun 2013-2022

Berbagai kebijakan dan program-program yang di laksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun masih jauh dari kata permasalahan dan belum menumbuhkan hasil yang baik. Berikut jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Ternate di lihat dari presentase dari Tahun 2013-2022 dapat di lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Dan Presentase Kemiskinan
Di Kota Ternate Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (persen %)
2013	6,60
2014	6,61
2015	6,37
2016	5,74
2017	6,04
2018	6,76
2019	7,25
2020	8,18
2021	8,45
2022	7,54

Sumber : Dara Diolah 2023

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa hasil upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pemerintah Kota Ternate dalam rangka mengulangi kemiskinan memperlihatkan hasil yang belum maksimal. Jumlah penduduk miskin dan presentase kemiskinan di Provinsi Maluku Utara khususnya di Kota Ternate dari Tahun 2013-2022 selalu mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Selain itu pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami proses peningkatan dan mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu Kota dapat dilihat dari produktivitas Kota tersebut. Produktivitas Kota merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh seluruh penduduk itu secara agregat, berikut

pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate
Tahun 2013-2022

Tahun	Presentase(%)
2013	7,67
2014	8,74
2015	8,09
2016	7,99
2017	7,55
2018	8,24
2019	8,00
2020	-1,61
2021	2,56
2022	5,31

Sumber :Data Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi Kota Ternate dari Tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yaitu sebesar 7,67%, di Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,74%, dan dalam Tahun 2015 mengalami sedikit penurunan sebesar 8,09, kemudian pada tahun 2016-2017 juga mengalami penurunan sebesar 7,99 ke 7,55, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,24, kemudian pada Tahun 2019 sedikit mengalami penurun sebesar 8,0%, akan tetapi pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara drastis sebesar -1,61% sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan 2,56% kemudian pada Tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 5,31%.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya tingkat kemiskinan. Sehingga kualitas sumber daya manusia dapat diketahui dengan melihat indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya

produktivitas kerja seseorang. Produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan dan mengakibatkan jumlah kemiskinan bertambah.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Ternate Tahun 2013-2022

Tahun	IPM (%)
2013	76,69
2014	77,15
2015	77,65
2016	77,80
2017	78,48
2018	79,13
2019	80,03
2020	79,82
2021	80,14
2022	80,81

Sumber : Data Diolah 2023

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa IPM Kota Ternate selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2013 hingga 2019 sebesar 76,69% sampai 80,03 %, kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 79,82 %, dan pada Tahun 2021 sampai Tahun 2022 suda mengalami kenaikan dari 80,14% ke 80,81 %. Peningkatan IPM setiap Tahunnya menyebabkan naiknya produktivitas kerja seseorang. Produktivitas naik berdampak pada pendapatan dan mengakibatkan tingkat kemiskinan di Kota Ternate turun dari Tahun 2013 hingga 2022. Apabila IPM mengalami peningkatan dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Jika kesejahteraan meningkat tingkat kemiskinan menjadi berkurang.

Selain pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia upah minimum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah merupakan imbalan yang diberikan kepada para pekerja dalam bentuk uang. Besar atau kecilnya tingkat upah yang di buat oleh pemerintah akan berpengaruh pada permintaan pasar tenaga kerja. Rakhmawati & Boedirochminarni (2018) mengemukakan jika upah menjadi faktor yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga dapat meningkatkan semangat para pekerja. Menurut Gregory & Zierahn (2022) para pekerja yang lebih memiliki keterampilan dan pendidikan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi.

Dalam pasal 48 dan pasal 50 peraturan pemerinta nomor 78 tahun 2015 tentang pengupaan, perlu menetapkan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang upah minimum.di mana upah minimum ditetapkan setiap Tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang di tetapkan olah pemerinta Kota itu sendiri, Berikut upah minimum kota ternate di bawa ini.

Tabel 1.5
Upah Minimum Kota Ternate Tahun 2013-2022

Tahun	UMK (Rp)	Persen(%)
2013	Rp 1.400.000.00	7,09
2014	Rp 1.505.000.00	7,43
2015	Rp 1.700.000.00	7,62
2016	Rp 1.905.500.00	7,80
2017	Rp 1.975.000.00	7,83
2018	Rp 2.320.805.00	8,07
2019	Rp 2.608.408.00	8,11
2020	Rp 2.821.515.00	8,17
2021	Rp 2.750.680.00	8,24
2022	Rp 3.040.000.00	8,63

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 1.5 upah minimum Kota Ternate terus mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Didalam pasar tenaga kerja, upah merupakan harga tenaga kerja. oleh karena itu, upah harus mencerminkan apa yang telah diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Upah di Kota Ternate juga masi di bilang rendah jika di bandingkan dengan upah di Kota-Kota yang lain, upah minimum juga sangat dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk memilih judul dalam penelitian ini yaitu “ **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Ternate** “

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar blakang di atas maka permasalahan yang dapat di identifikasi adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Ternate?
- 2 Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Ternate
- 3 apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Ternate?
- 4 Apakah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Ternate.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar blakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan terhadap kemiskinan Di Kota Ternate
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan Di Kota Ternate.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi ,indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan kemiskinan. serta memberikan informasi ke berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan hasil penelitian ini dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi daerah hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pemerintah kota ternate dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan mengenai penyerapan tenaga kerja.
2. Bagi penulis untuk penyelesaian skripsi dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan bisnis universitas khairun.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang akan melakukan penelitian terkait pada bidang penelitian yang sama pada masa yang akan.